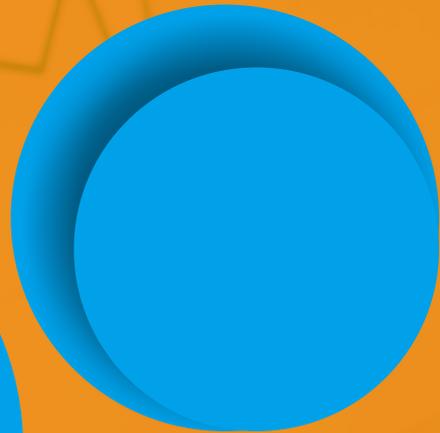


INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT Kabupaten Bandung 2020



INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT Kabupaten Bandung 2020



11:00

769

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG 2020

No. Publikasi: 3204.2037

Katalog: 1101002.3204

Ukuran Buku: 23 cm x 17 cm

Jumlah Halaman: xii + 103 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Bandung

Gambar Kulit oleh:

Seksi IPDS BPS Kabupaten Bandung

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Agung Hartadi, S.Si, M.E

Koordinator Teknis : Ria Yunita Emkaen S.Si, M.E.

Penulis : Jumadi, S.Si

Penyunting : Dani Wildan Hakim, S.Si, M.E

Pengolah Data : Jumadi, S.Si

Gambar Kulit : Nurdianto Zaenuridin, S.Si, M.T.

<https://bandungkita.bp.go.id>

KATA PENGANTAR



Data yang terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil-hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 merupakan hasil pengumpulan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi pokok bidang sosial ekonomi seperti kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk angka persentase dari suatu populasi. Sejumlah data dibedakan menurut jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan analisis kesenjangan gender.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan kebutuhan data statistik kesejahteraan rakyat sebagian besar sudah dapat dipenuhi. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Soreang, Desember 2020

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG
Kepala,

Agung Hartadi, S.Si, M.E
NIP. 19750909 199403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Hal Kutip	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	
Bab 1 Kependudukan	2
Bab 2 Perkawinan dan Administrasi Kependudukan	11
Bab 3 Kesehatan	22
Bab 4 Fertilitas dan Keluarga Berencana	31
Bab 5 Pendidikan	39
Bab 6 Ketenagakerjaan	52
Bab 7 Taraf dan Pola Konsumsi	68
Bab 8 Perumahan	77
Bab 9 Sosial Lainnya	94
Bab 10 Teknologi Informasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal.
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2016-2019	5
1.2	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2019)	6
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok umur untuk beban tanggungan Tahun 2019	8
1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	9
2.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019	12
2.2	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019	14
2.3	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dan Jenis Kelamin Tahun 2019	16
2.4	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Kelompok Umur, 2019	17
2.5	Persentase Penduduk 17 Tahun Ke atas menurut kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2019	18
3.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Berdasarkan Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	27
3.2	Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik dan jenis jaminan kesehatan Tahun 2019	29
4.1	Persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan menurut tempat melahirkan Tahun 2019	34
4.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Tahun 2018-2019	36

Tabel	Judul	Hal.
5.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Tahun 2019	42
5.2	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	43
5.3	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	44
5.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal (Paket A/B/C) menurut Kelompok Umur Tahun 2019	46
5.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal (Paket A/B/C) Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019	48
5.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019	50
6.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019	55
6.2	Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Tahun 2019	58
6.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019	60
6.4	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019	63
6.5	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019	66
7.1	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2019	70

Tabel	Judul	Hal.
7.2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2019	71
7.3	Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang Tahun 2019	73
7.4	Rata-Rata Konsumsi Protein(gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang Tahun 2019	75
8.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2019	80
8.2	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita (m ²) Tahun 2019	82
8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Terluas Tahun 2019	83
8.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2019	84
8.5	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2019	85
8.6	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2019	86
8.7	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2019	87
8.8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Memasak Tahun 2019	89
8.9	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak Tahun 2019	91
8.10	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2019	92
9.1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2019	95
9.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial selama Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial Tahun 2019	98

Tabel	Judul	Hal.
9.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset Tahun 2019	99
10.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	102
10.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	102

<https://bandungkab.bps.go.id>

DAFTAR SINGKATAN

BAB II. KEPENDUDUKAN

KRT	:	Kepala Rumah Tangga
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan

BAB III. PENDIDIKAN

APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
SD	:	Sekolah Dasar
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan

BAB IV. KESEHATAN

ASI	:	Air Susu Ibu
Baduta	:	Bawah Dua Tahun
Balita	:	Bawah Lima Tahun
BCG	:	<i>Bacillus Calmette Guerin</i>
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
DPT	:	Difteri, Pertusis, Tetanus
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamsostek	:	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

BAB V. FERTILITAS DAN KB

AKDR	:	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
IUD	:	<i>Intra Uterine Device</i>
KB	:	Keluarga Berencana
MKJP	:	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP	:	Metoda Operasi Pria
MOW	:	Metoda Operasi Wanita

BAB VI. PERUMAHAN

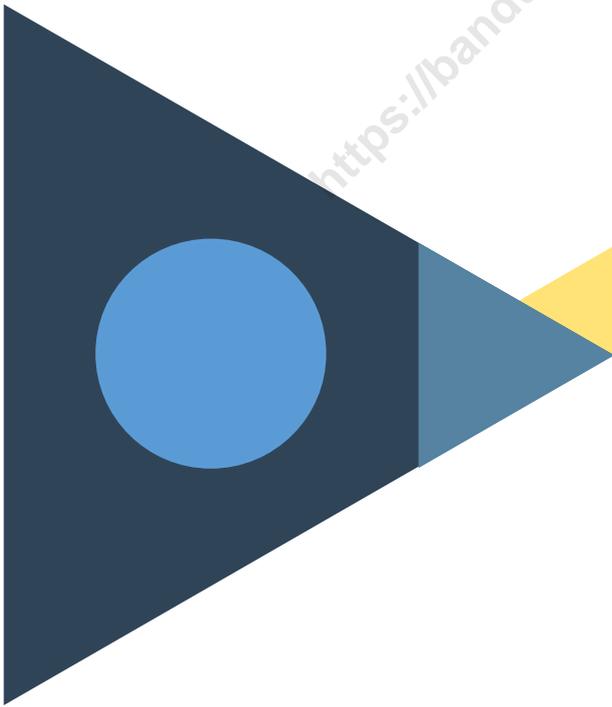
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
MCK	:	Mandi, Cuci, Kakus
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
SHM	:	Surat Hak Milik
SHGB	:	Surat Hak Guna Bangunan
SHRS	:	Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun
SPAL	:	Saluran Pembuangan Air Limbah

BAB VII. LAIN-LAIN

AC	:	<i>Air Conditioner</i>
BBM	:	<i>Blackberry Messenger</i>
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
KG	:	Kilogram
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
PC	:	<i>Personal Computer</i>
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PKH	:	Program Keluarga Harapan
Raskin	:	Beras Miskin
Rastra	:	Beras Sejahtera
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat

<https://bandungkab.bps.go.id>

I. Kependudukan



Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan. Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga diyakini akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 17 mengamanatkan bahwa perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

| Kependudukan

Data kependudukan sangat diperlukan untuk pemerintah, berbagai lembaga swasta maupun pihak lainnya. Bagi pihak pemerintah data kependudukan sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, misalnya sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana hiburan atau sarana tempat ibadah.

Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung selama ini berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk. Walaupun demikian, jumlah penduduk masih akan terus bertambah karena mobilitas yang tinggi.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Kependudukan

Dinamika perkembangan penduduk akan memengaruhi strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan, terdiri dari 10 kelurahan dan 270 desa. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019 di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 3.775.279 jiwa.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar 102,53 atau 103 dengan pembulatan. Ini berarti bahwa perbandingan setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 103 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Komposisi ini tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka *sex ratio* ini mengalami kecenderungan penurunan. Dari sekitar 102,95 di tahun 2016 menjadi 102,53 di tahun 2019, dengan kata lain walaupun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap tahunnya bertambah, namun kenaikan jumlah perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kenaikan laki-laki.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Tahun 2016-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	<i>Sex Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	1.816.497	1.764.445	102,95
2017	1.853.603	1.804.098	102,74
2018	1.882.917	1.834.374	102,65
2019	1.911.189	1.864.090	102,53

Sumber: Proyeksi Penduduk, 2016-2019

Menilik lebih dalam, jumlah laki-laki relatif lebih banyak dari perempuan, untuk kelompok umur 0-9 tahun, 10-19 tahun dan kelompok umur 40-49 tahun. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kelompok umur 0-9 tahun memiliki *sex ratio* 101,7, artinya setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 (pembulatan teori *aproksimasi* dari 101,7) penduduk laki-laki. Begitu pun untuk rentang usia 10-19 tahun dan 40-49 tahun terlihat bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki.

Tabel 1.2. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-9	19,26	18,94	19,11	101,7
10-19	17,58	17,21	17,40	102,2
20-29	16,63	16,69	16,66	99,6
30-39	15,82	15,98	15,90	99,0
40-49	13,49	13,26	13,38	101,7
50-59	9,41	9,46	9,43	99,4
60+	7,82	8,45	8,13	92,5
Jumlah	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Proyeksi Penduduk, 2019

Sedangkan untuk kelompok umur rentang usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, 50-59 tahun dan 60+ tahun memiliki *sex ratio* di bawah 100, artinya dalam rentang-rentang usia tersebut lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki.

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum dan tidak produktif lagi. Semakin rendah persentase angka beban ketergantungan

Kependudukan

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat dari semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Rasio beban tanggungan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

dimana :

DR = Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*)

P_{0-14} = Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun

P_{15-64} = Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun

P_{65+} = Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun Ke Atas

Pada tahun 2019 angka beban tanggungan di Kabupaten Bandung terhitung sebesar 51,23 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 51 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Tabel 1.3 Berdasarkan Kelompok Umur untuk Beban
Tanggung Tahun 2019**

Kelompok Umur	0-14	15-64	65+	Angka Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk	1.117.551	2.496.345	161.383	51,23

Sumber: Proyeksi Penduduk 2019

Penggambaran penduduk menurut struktur umur berguna untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan penduduk non produktif. Hal ini akan berpengaruh pada angkatan kerja di suatu wilayah serta tingkat ketergantungan penduduk non produktif pada penduduk produktif. Selain itu, penggambaran penduduk menurut struktur umur juga diperlukan untuk penghitungan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi.

Kelompok umur 15-64 tahun di Kabupaten Bandung tahun 2019 merupakan kelompok umur dengan persentase terbesar dibanding kelompok umur 0-14 tahun atau 65+ tahun yaitu sebesar 66,97%. Kelompok umur ini menunjukkan kelompok umur produktif.

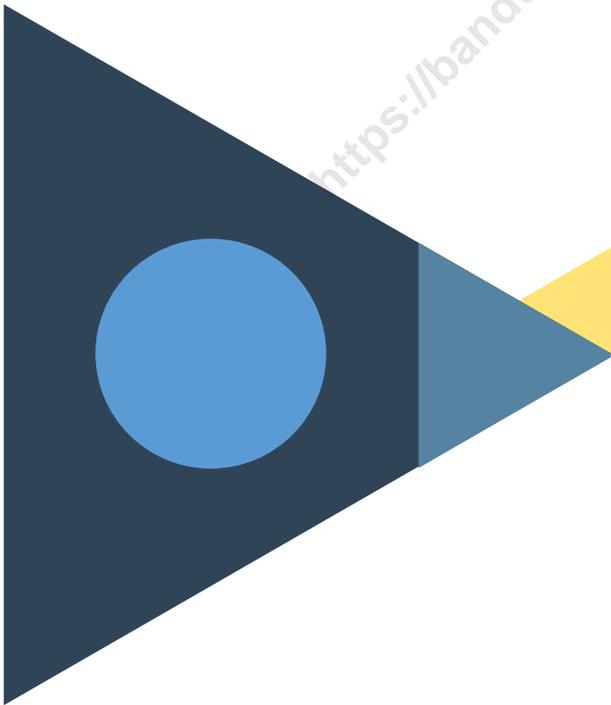
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	28,17	27,59	27,89
15-64	66,98	66,96	66,97
65+	4,85	5,45	5,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Proyeksi Penduduk, 2019

Secara tidak langsung angka ini dapat digunakan sebagai indikator potensi kemajuan ekonomi dari suatu daerah. Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk kelompok umur non produktif secara ekonomi (dibawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang dianggap produktif secara ekonomi (usia 15 sampai 65 tahun). Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil jumlah penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok penduduk tidak produktif.

II. Perkawinan dan Administrasi Kependudukan



Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang perempuan untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 Tahun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan Presiden tanggal 14 Oktober Tahun 2019, merupakan UU perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1). Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 Tahun.

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang perempuan dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	35,02	25,24	30,27
Kawin	60,32	63,81	62,02
Cerai	4,65	10,94	7,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2019 jumlah persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas dengan status perkawinan belum kawin lebih besar dibanding perempuan, yaitu sebesar 35,02% untuk laki-laki dan sebesar 25,24% untuk perempuan. Sementara itu persentase jumlah perempuan dengan status perkawinan sudah pernah kawin lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 63,81%, selisih 3,49 poin dengan persentase laki-laki yang sebesar 60,32%.

Disisi lain, untuk status perkawinan cerai, persentase perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, dengan persentase cerai 10,94% perempuan dan 4,65% laki-laki. Diduga adanya fenomena ini dikarenakan adanya kecenderungan perempuan yang sudah berpisah dengan pasangannya tidak menikah lagi, namun sebaliknya adanya kecenderungan untuk menikah lagi bagi laki-laki yang berpisah dengan pasangannya.

Untuk penduduk usia produktif (15-49 tahun), persentase laki-laki dengan status perkawinan belum kawin lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 35,04% untuk laki-laki dan 21,57% untuk perempuan.

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Sebaliknya, untuk status perkawinan sudah kawin, persentase perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 73,87% untuk perempuan dan 61,69% untuk laki-laki. Status perkawinan cerai untuk laki-laki 3,27% sedangkan perempuan 4,56%.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	35,04	21,57	28,52
Kawin	61,69	73,87	67,59
Cerai	3,27	4,56	3,89
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Di Kabupaten Bandung, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 mencatat bahwa kesadaran untuk memiliki akte kelahiran untuk kelompok umur 0-17 tahun Tahun 2019 cukup tinggi, yaitu 77,85%, dimana sekitar 64,05% penduduk dapat menunjukkan akte kelahirannya sementara 13,80% tidak dapat menunjukkan akte kelahiran.

Di sisi lain jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang tidak memiliki akte kelahiran tercatat sebesar 21,87%, sementara sisanya sekitar 0,27% tidak mengetahui apakah punya akte kelahiran atau tidak, berdasarkan informasi dari anggota rumah tangga. Kesadaran akan kepemilikan akte kelahiran baru disadari ketika penggunaan akte kelahiran baru betul-betul akan dipakai, seperti untuk daftar

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

masuk sekolah atau kegiatan lainnya. Sehingga baru dilakukan pembuatan akte kelahiran ketika usianya sudah cukup dewasa.

Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Tabel 2.3. Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Memiliki, Dapat Ditunjukkan	62,29	65,98	64,05
Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	15,10	12,38	13,80
Tidak Memiliki	22,48	21,21	21,87
Tidak Tahu	0,13	0,42	0,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas Menurut
**Tabel 2.4. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 Tahun 2019**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Memiliki	97,23	97,50	97,36
Tidak Memiliki	2,77	2,50	2,64
Jumlah	100	100	100

Sumber: Susenas, 2019

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 juga mencatat bahwa 97,36% penduduk Kabupaten Bandung yang berusia 5 tahun ke atas memiliki sudah memiliki NIK, sementara sisanya sekitar 2,64% belum memiliki NIK. Kepemilikan NIK ini harus terus diupayakan, mengingat identitas warga negara sangat diperlukan.

**Persentase Penduduk 17 Tahun Ke atas Menurut
Tabel 2.5. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Tahun 2019**

Kepemilikan NIK	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Memiliki	97,28	97,55	97,41
Tidak Memiliki	2,72	2,45	2,59
Jumlah	100	100	100

Sumber: Susenas, 2019

Perbandingan dengan penduduk Kabupaten Bandung usia 17 tahun ke atas memiliki yang memiliki NIK sudah mencapai angka 97,41%. Sementara 2,59% yang tersisa belum memiliki NIK. Angka ini relatif lebih kecil dibanding kelompok usia 5 tahun ke atas yang belum memiliki NIK, seiring keperluan identitas di usia dewasa untuk berbagai keperluan.

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa NIK adalah nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK yang terdiri dari 16 digit dibagi atas tiga kode: wilayah, waktu lahir dan nomor urut kelahiran. NIK ini akan dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk yang hendak diterbitkan (KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya). NIK akan diberikan kepada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

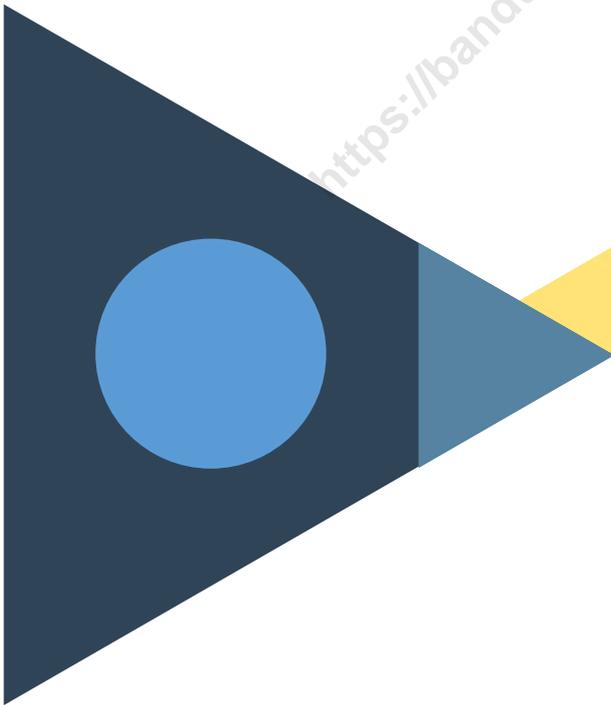
Dalam perkembangannya, NIK ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pelayanan publik ke depan. Selain itu, NIK dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti paspor, surat sertifikat hak milik, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan sebagainya. Dengan pemberlakuan NIK, maka tolok ukur dalam pelayanan publik adalah NIK. Oleh karena itu, posisi NIK sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional ke depan.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar maka diharapkan dengan adanya sistem seperti ini, tertib administrasi kependudukan dapat terwujud.

Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

Dengan tertib administrasi, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negaranya. Selama ini, karena kurang tertibnya administrasi kependudukan, maka sering dijumpai kepemilikan KTP ganda, sertifikat doble, KTP dan paspor asli tapi palsu. Kedepannya, NIK dapat diakses oleh semua instansi administrasi kependudukan sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih. Warga Negara Indonesia pun tak perlu lagi hidup dengan setumpuk nomor identitas yang berbeda. Untuk lebih mengefektifkan administrasi kependudukan dan terwujudnya sistem administrasi kependudukan nasional yang efektif dan terintegrasi, harus ada sistem pelayanan, sistem pendaftaran, serta sistem penerbitan dokumen kependudukan yang rapi.

III. Kesehatan



Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Di Kabupaten Bandung pembangunan di bidang kesehatan mendapat perhatian yang lebih khusus. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung terutama pada misi ke-2 yaitu “Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.” Misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Pembangunan di bidang kesehatan tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana kesehatan saja, namun juga pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat, yaitu mengubah perilaku masyarakat agar terbiasa dengan pola hidup yang sehat.

Kesehatan

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai suatu derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan pada gilirannya akan bermuara pada meningkatnya kesehatan masyarakat secara umum. Sehingga pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan bisa berakselerasi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini akan tercermin antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka harapan hidup.

Manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Sebagai obyek, kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari pembangunan. Sedangkan sebagai subyek, manusia adalah pelaku dari pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas SDM. Perbaikan kualitas SDM di bidang kesehatan akan sangat mendorong meningkatnya produktivitas terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk karena merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat serta memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan pada waktu tertentu.

Upaya melalui berbagai program pembangunan bidang kesehatan telah banyak dilakukan pemerintah. Berbagai program tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok program kuratif dan rehabilitatif serta kelompok program promotif dan preventif.

Program kuratif dan rehabilitatif ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan (1) peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar; serta (4) pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin. Sedangkan program promotif dan preventif dilakukan melalui: (1) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, serta (2) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Pembangunan kesehatan yang memprioritaskan upaya kuratif dan rehabilitatif haruslah dilakukan seimbang dengan upaya promotif dan preventif.

Kesehatan

Untuk melihat gambaran program kuratif pembangunan kesehatan masyarakat, beberapa indikator kesehatan yang bisa digunakan antara lain status kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Sementara itu keberhasilan program-program preventif pemerintah dapat dilihat antara lain dari perilaku kesehatan masyarakat seperti persentase bayi yang dilahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan, persentase bayi memperoleh imunisasi lengkap maupun ASI eksklusif, persentase wanita usia subur berstatus kawin peserta KB, dan sebagainya.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan. Diantaranya adalah Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Kesehatan

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah status kesehatan. Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan angka morbiditas (angka kesakitan) dan rata-rata lamanya sakit.

Seberapa baik status kesehatan penduduk dapat diukur melalui angka morbiditas. Morbiditas menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan yang lalu, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang tidak terbatas pada satu keluhan yang paling sering saja, tetapi bisa beberapa keluhan asal keluhan-keluhan yang diderita tersebut terjadi dalam waktu satu bulan yang lalu. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan angka kesakitan yang ditunjukkan akan semakin tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019 di Kabupaten Bandung, memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kondisi penduduk Kabupaten Bandung yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari selama sebulan terakhir sebanyak 15,93%. Sementara 84,07% sisanya tidak mengalami keluhan kesehatan atau mengalami keluhan namun tidak menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan
Tabel 3.1. Kesehatan Berdasarkan Angka Kesakitan menurut
Jenis Kelamin Tahun 2019

Keluhan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kesakitan	14,86	17,07	15,93

Sumber: Susenas, 2019

Menilik lebih dalam, dari angka kesakitan sebesar 15,93% persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, ada sekitar 14,86% penderita laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa 14,86 dari populasi laki-laki di tahun 2019 mengalami keluhan

Kesehatan

kesehatan, baik sakit ringan ataupun sakit berat. Sementara sisanya 85,14% laki-laki tidak mengalami keluhan kesehatan.

Sedangkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan untuk perempuan terhitung sebesar 17,07%. Angka ini menunjukkan bahwa 17,07% dari populasi perempuan Kabupaten Bandung di tahun 2019 mengalami keluhan kesehatan, baik sakit ringan ataupun sakit berat. Sementara sisanya 82,93% perempuan tidak mengalami keluhan kesehatan.

Berdasarkan perbandingan angka kesakitan antara laki-laki dan perempuan, bisa disimpulkan bahwa penderita perempuan relatif lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dari pada laki-laki di tahun 2019.

Dari total penduduk yang menderita sakit dan memilih untuk berobat jalan, terdapat 38,01% penduduk yang berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan dengan rincian sebesar 35,84% untuk laki-laki dan 39,72% untuk perempuan.

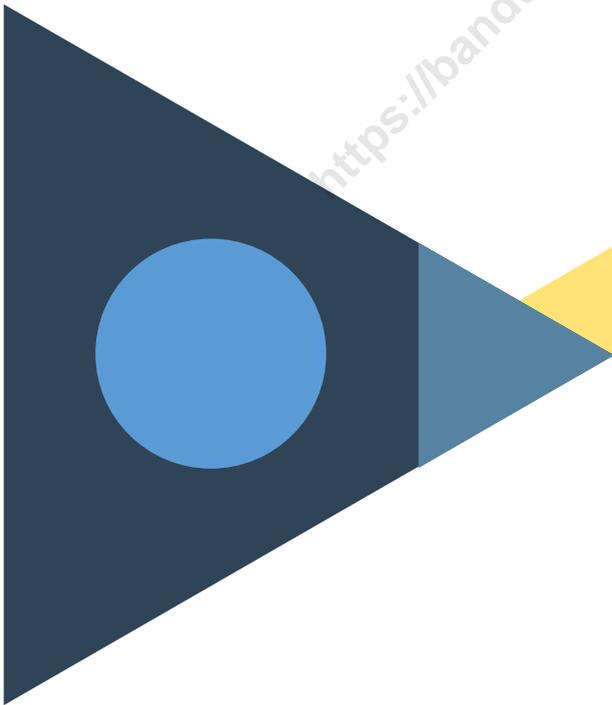
Tabel 3.2. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik dan jenis jaminan kesehatan Tahun 2019

Jaminan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menggunakan Jaminan Kesehatan	35,84	39,72	38,01
Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan	64,16	60,28	61,99

Sumber: Susenas, 2019

Sisanya sebanyak 61,99% penduduk berobat jalan dengan tidak menggunakan jaminan kesehatan. Diantara mereka yang sakit ada yang berobat jalan dengan membayar sendiri ke fasilitas kesehatan, atau mengobati sendiri baik dengan membeli obat di toko obat atau tidak membeli obat.

IV. Fertilitas dan KB



Fertilitas dan Keluarga Berencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umur perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Sedangkan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 tertulis bahwa "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*". Namun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan Presiden tanggal 14 Oktober Tahun 2019, merupakan UU perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1).

Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu

Fertilitas dan Keluarga Berencana

diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Logika seperti itu secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Secara mikro hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.

Tempat melahirkan anak bagi seorang perempuan bisa menggambarkan tingkat kesehatan. Apabila melahirkannya tidak di rumah sakit atau minimal bidan maka pertolongan terhadap anak dan ibu yang melahirkan jadi tidak maksimal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Penolong kelahiran yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Sehingga, dipilihnya tenaga kesehatan terlatih akan membantu menurunkan resiko persalinan dan dengan demikian dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan

Fertilitas dan Keluarga Berencana

meningkatkan pelayanan neonatal karena dapat memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi kesehatan standar.

Perempuan yang pernah kawin dan melahirkan memiliki pilihan tempat untuk melahirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemilihan tempat ini cukup berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan di lahirkan.

Pada tahun 2019 penduduk perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kabupaten Bandung yang pernah melahirkan di faskes sebesar 89,76%. Angka ini terdiri dari 15,61% yang melahirkan di rumah sakit/RSIA, 33,31% yang melahirkan di RS Bersalin/klinik dan 40,84% yang melahirkan di puskesmas/praktek nakes. Sementara sisanya sebesar 10,24% penduduk perempuan di Kabupaten Bandung melahirkan di rumah, baik dengan pertolongan bidan, dukun bayi atau lainnya.

Tabel 4.1 Persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Tahun 2019

Tempat Melahirkan	Persentase
(1)	(2)
Rumah Sakit/ RSIA	15,61
RS Bersalin/ Klinik	33,31
Puskesmas/Praktek Nakes	40,84
Rumah	10,24
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera (Wiyono, 1997).

Fertilitas dan Keluarga Berencana

Program KB sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan, memiliki implikasi yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, program KB memiliki potensi untuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan, yakni mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta berperan dalam pengangkatan isu kesetaraan gender.

Keberhasilan dari program KB sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang ada, baik dari dalam keluarga maupun luar keluarga. Pendidikan dan tingkat kemampuan ekonomi keluarga adalah diantara sekian banyak faktor yang muncul dari dalam. Sedangkan komunikasi dan budaya, merupakan faktor yang datang dari luar peserta KB, yang mempunyai kemungkinan dalam memengaruhi para peserta dalam menentukan jenis alat kontrasepsi yang menurut mereka dianggap paling baik dan aman.

Dengan berhasilnya pelaksanaan KB diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih meningkat. Pasangan suami istri yang hidup bersama dengan usia istrinya antara 15-49 tahun atau

Fertilitas dan Keluarga Berencana

pasangan usia subur merupakan sasaran dari program KB karena pada usia tersebut seseorang perempuan berpeluang untuk melakukan reproduksi.

Tabel
4.2. **Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Tahun 2018-2019**

Status Penggunaan Alat/Cara KB	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Pernah menggunakan	6,79	13,38
Sedang menggunakan	73,35	64,09
Tidak Pernah Menggunakan	19,86	22,53
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2018-2019

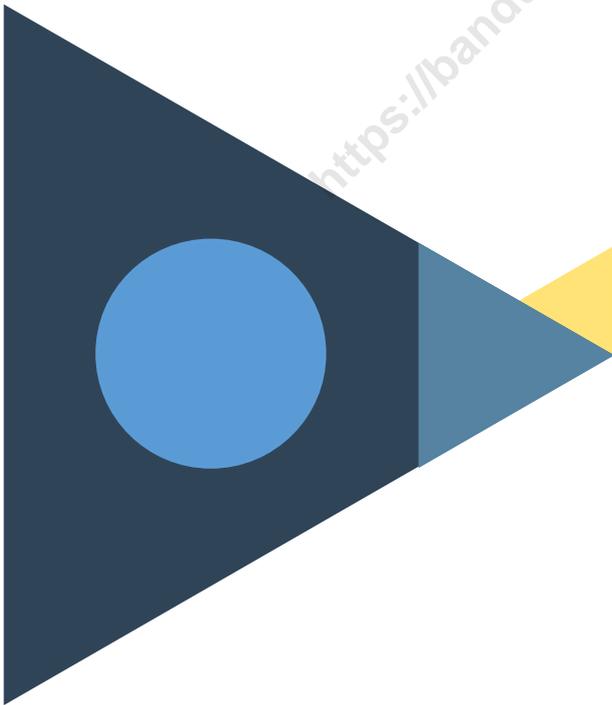
Penggunaan KB yang bertujuan untuk pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera. Penggunaan KB yang diterapkan oleh penduduk di Kabupaten Bandung tahun 2019 masih belum maksimal dibandingkan tahun 2018. Hal ini terlihat dari

Fertilitas dan Keluarga Berencana

persentase yang pernah dan sedang menggunakan alat KB sebesar 77,47% turun 2,67 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini terdiri dari 13,38% yang pernah menggunakan KB dan 64,09% yang sedang menggunakan KB.

<https://bandungkab.bps.go.id>

V. Pendidikan



<https://bandungkab.bptsp.id>

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama kualitas SDM suatu bangsa. Salah satu faktor utama paling menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya SDM berkualitas. Upaya peningkatan SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa.

Pendidikan dapat mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas yang dapat mendukung kemajuan bangsa.

Pendidikan

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas SDM. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan keinginan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan SDM merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan agar masyarakat dapat bersaing menghadapi era globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan, menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas SDM, maka pemerintah bersama kalangan swasta terus berupaya mewujudkan amanat melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas.

Pendidikan adalah modal dasar untuk mencetak generasi yang produktif dan berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan adalah investasi terbesar bagi suatu bangsa. Peranan pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, program pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan program pembangunan sarana prasarana sekolah, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Keberhasilan program-program tersebut tentunya perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan data atau indikator yang dapat mengukur keberhasilan atau tingkat pencapaian pembangunan yang telah dijalankan.

Keberhasilan pendidikan tersebut salah satunya bisa dilihat dari kemampuan membaca dan menulis, untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin di Kabupaten Bandung tahun 2019 sudah mencapai 99,68%, dan tinggal sebanyak 0,32% yang belum mampu membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya baru mencapai 55,90%.

Angka melek huruf adalah kemampuan baca tulis. Persentase angka melek huruf penduduk Kabupaten Bandung tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 sebesar 99,78. Sedangkan persentase kemampuan baca tulis huruf latin sebesar 99,68, artinya ada selisih 0,10 antara persentase melek huruf dan kemampuan huruf latin. Ini bermakna bahwa ada 0,10% penduduk, baik laki-laki

Pendidikan

atau perempuan, yang bisa baca tulis huruf selain huruf latin, seperti huruf arab, cina atau lainnya, tetapi tidak bisa baca tulis huruf latin.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Tabel 5.1. menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan
Jenis Kelamin Tahun 2019

Mampu Baca Tulis	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,61	99,75	99,68
Huruf Lainnya	56,27	55,50	55,90
Melek Huruf			99,78

Sumber: Susenas, 2019

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya, yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya yang tinggi, dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang

Pendidikan

tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

Hasil Susenas tahun 2019, menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Bandung usia 5 tahun ke atas yang bersekolah di SD/Sederajat sebanyak 12,78%. Penduduk yang bersekolah di SMP/Sederajat mencapai angka 5,37%, sedangkan yang bersekolah di SMA ke atas sebanyak 5,92%.

Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan
Tabel 5.2. Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,93	4,07	3,99
SD/Sederajat	12,97	12,57	12,78
Masih Sekolah			
SMP/ Sederajat	5,28	5,47	5,37
SMA ke atas	5,97	5,86	5,92
Tidak Bersekolah Lagi	71,85	72,03	71,94
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Pendidikan

Sedangkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Bandung yang tidak/belum pernah sekolah hanya 3,99%, ini berarti bahwa 96,01% penduduk Kabupaten Bandung berumur 5 tahun ke atas pernah bersekolah. Dari usia tersebut yang sudah tidak bersekolah lagi persentasenya mencapai 71,94% baik itu yang tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau yang putus sekolah.

Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur

Tabel 5.3. 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,00	0,00	0,00
SD/ Sederajat	34,86	34,88	34,87
Masih Sekolah			
SMP/ Sederajat	15,02	15,77	15,38
SMA ke atas	16,12	16,66	16,38
Tidak Bersekolah Lagi	34,00	32,69	33,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Pendidikan

Pada kelompok umur 7-24 tahun, persentase penduduk di Kabupaten Bandung yang tidak/belum pernah sekolah adalah 0,00%, ini berarti bahwa 100% penduduk Kabupaten Bandung umur 7-24 tahun pernah bersekolah. Dari usia tersebut yang sudah tidak bersekolah lagi persentasenya mencapai 33,37% baik itu yang tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau yang putus sekolah.

Indikator lain yang berkaitan dengan pendidikan adalah tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal (Paket A/B/C) menurut Kelompok Umur Tahun 2019

Uraian	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
APS	99,69	90,48	64,15

Sumber: Susenas, 2019

Indikator lain yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) menghitung persentase anak kelompok usia tertentu yang berstatus sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani kelompok usia itu. APM untuk tingkat SD dan sederajat adalah jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah SD atau sederajat dibagi jumlah anak usia 7-12 tahun. APM untuk tingkat SMP dan sederajat adalah jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP atau sederajat dibagi jumlah anak usia 13-15 tahun. APM untuk tingkat SMA atau sederajat adalah jumlah anak usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SMA atau sederajat dibagi jumlah anak usia 16-18 tahun.

Pendidikan

Pemerintah berharap APM ini mampu menunjukkan peningkatan dan sebagai gambaran kesuksesan dalam dunia pendidikan. Kesuksesan pendidikan ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Namun ternyata APM Kabupaten Bandung masih menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, disamping faktor ekonomi, fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata dan sangat terbatas turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Jenjang pendidikan SD memiliki persentase APM sebesar 99,02%, ini berarti dari 100 orang usia anak 7-12 tahun terdapat 99 orang sedang menjalani pendidikan di tingkat SD, jadi hanya 1 orang yang tidak bersekolah di SD. Jenjang pendidikan SMP memiliki persentase angka partisipasi murni sebesar 82,06%, ini berarti dari 100 orang usia anak 13-15 tahun terdapat 82 orang sedang menjalani

Pendidikan

pendidikan di tingkat SMP, jadi hanya 18 orang yang tidak bersekolah di SMP.

Tabel 5.5
Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal (Paket A/B/C) Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
APM	99,02	82,06	52,75

Sumber: Susenas, 2019

Jenjang pendidikan SMA memiliki persentase angka partisipasi murni sebesar 52,75%, ini berarti dari 100 orang usia anak 16-18 tahun terdapat 53 orang sedang menjalani pendidikan di tingkat SMA, dan 47 orang yang tidak bersekolah di SMA.

Indikator terakhirnya, Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

APK formal dan nonformal penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Bandung untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 105,14%. Hal ini berarti bahwa terdapat 5,14% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD.

Pendidikan

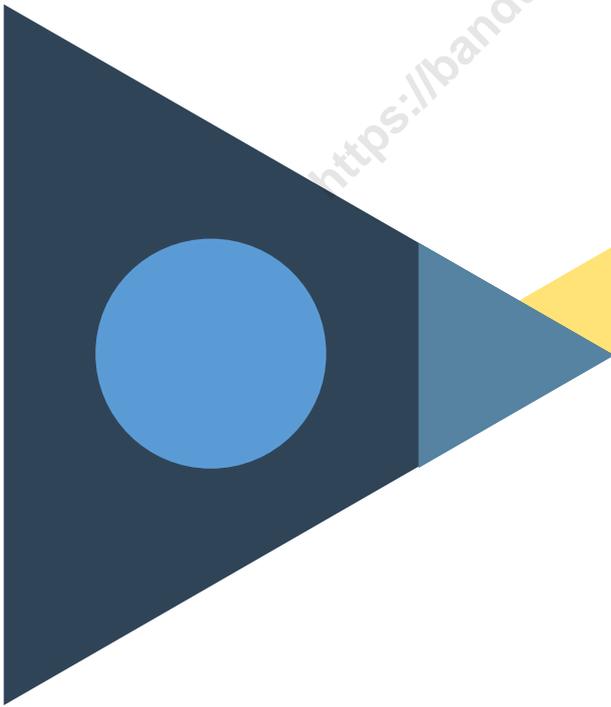
Baik untuk penduduk laki-laki atau perempuan pada jenjang pendidikan SD nilai APK lebih dari 100%, yang berarti bahwa terdapat penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019
Tabel 5.6

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
APK	105,14	89,99	63,74

Sumber: Susenas, 2019

VI. Ketenagakerjaan



Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting untuk penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Konsep ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam periode seminggu yang lalu (seminggu sebelum waktu survei). Masalah ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bandung pada khususnya, dalam tahun-

Ketenagakerjaan

tahun belakangan ini, diperkirakan akan semakin kompleks. Hal ini terindikasikan dari terus bertambahnya penduduk usia kerja tiap tahunnya.

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif dan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Selain itu, masih banyak pengangguran terbuka maupun terselubung (*disguised unemployed*) atau bekerja kurang dari jam kerja atau upah yang kurang (*under employed*). Hal ini diakibatkan dari masyarakat bercorak agraris, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, dan semakin banyaknya calon tenaga kerja baik yang berpendidikan maupun tidak. Beberapa konsekuensi yang sering timbul adalah tingkat upah yang rendah dan relatif kurang memadai serta terjadinya perpindahan penduduk usia produktif ke daerah lain yang lebih menjanjikan di bidang pekerjaan.

6.1. ANGKATAN KERJA

Penduduk merupakan sumber angkatan kerja, sehingga profil ketenagakerjaan merupakan gambaran kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan sendirinya akan mencerminkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja apabila tanpa dibarengi kesempatan kerja yang memadai, tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan sosial ekonomi. Untuk mengukur berbagai persoalan sosial ekonomi diperlukan indikator yang dapat mencerminkan kondisi sebenarnya yang sedang terjadi.

Pada tahun 2019, secara keseluruhan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung terhitung sebanyak 1.786.162 jiwa. Angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Bandung terhitung sebanyak 1.135.074 orang, yang terdiri dari 1.074.767 laki-laki bekerja, 26.132 laki-laki yang pernah bekerja, dan 34.175 laki-laki yang tidak pernah bekerja.

Sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebanyak 651.088 orang, yang terdiri dari 613.439 perempuan bekerja, 10.567 perempuan yang pernah bekerja dan 27.082 perempuan yang tidak pernah bekerja.

Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	1.135.074	651.088	1.786.162
✓ Bekerja	1.074.767	613.439	1.688.206
✓ Pernah Bekerja	26.132	10.567	36.699
✓ Tidak Pernah Bekerja	34.175	27.082	61.257
Bukan Angkatan Kerja	244.005	701.618	945.623
✓ Sekolah	100.572	95.957	196.529
✓ Mengurus rumah tangga	63.291	571.308	634.599
✓ Lain-lain	80.142	34.353	114.495
Jumlah	1.379.079	1.352.706	2.731.785

Sumber: Sakernas, 2019

Jumlah bukan angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebanyak 244.005 orang, yang terdiri dari 100.572 penduduk laki-laki yang sekolah, 63.291 penduduk laki-laki yang mengurus rumah tangga, dan 80.142 laki-laki yang melakukan kegiatan lainnya.

Jumlah bukan angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebanyak 701.618, yang terdiri dari 95.957 perempuan yang bersekolah, 571.308 perempuan yang mengurus rumah tangga, dan 34.353 perempuan yang melakukan kegiatan lainnya.

Sehingga secara keseluruhan jumlah bukan angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 sebanyak 945.623 orang, yang terdiri dari 196.529 penduduk yang sekolah, 634.599 penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 114.495 penduduk yang melakukan kegiatan lainnya.

6.2 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan

Ketenagakerjaan

kerja (TPAK). TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau juga tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja, tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Ketenagakerjaan

Pada tahun 2019 TPAK di Kabupaten Bandung mencapai 65,38%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase pada Tahun 2018 yang mencapai 61,89%. Peningkatan TPAK ini salah satunya disinyalir karena pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini bisa disebabkan tidak hanya pria yang keluar bekerja, akan tetapi wanita yang aktif di rumah tangga juga berperan aktif di dunia kerja.

Tabel 6.2 Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Tahun 2019

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
TPAK	61,89	65,38
TPT	5,00	5,48

Sumber: Sakernas, 2019

Begitu pun TPT Kabupaten Bandung tahun 2019 mencapai 5,48%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 0,48 poin, bila dibandingkan dengan persentase tahun 2018 yang mencapai 5,00%. Peningkatan angka tersebut ada kemungkinan dari meningkatnya lulusan anak sekolah yang belum berkerja. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

6.3 PENGANGGURAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019

Ijazah yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum tamat SD	1.299	2.022	3.321
SD Sederajat	8.113	4.623	12.736
SMP Sederajat	13.758	5.080	18.838
SMA Sederajat	30.469	18.253	48.722
Diploma / Universitas	6.668	7.671	14.339
Jumlah	60.307	37.649	97.956

Sumber: Sakernas, 2019

Pada tahun 2019 jumlah pengangguran penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung terhitung sebanyak 60.307 orang. Angka ini

Ketenagakerjaan

terdiri dari 1.299 penduduk yang tidak/belum pernah sekolah/tidak belum tamat SD; 8.113 orang yang memiliki ijazah SD Sederajat; 13.758 orang yang memiliki ijazah SMP Sederajat; 30.469 orang yang memiliki ijazah SMA Sederajat; dan 6.668 orang yang memiliki ijazah Diploma/Universitas.

Sedangkan jumlah pengangguran penduduk perempuan yang termasuk pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung terhitung sebanyak 37.649 orang. Angka ini terdiri dari 2.022 orang yang tidak/belum pernah sekolah/tidak belum tamat SD; 4.623 orang yang memiliki ijazah SD Sederajat; 5.080 orang yang memiliki ijazah SMP Sederajat; 18.253 orang yang memiliki ijazah SMA Sederajat dan 7.671 orang yang memiliki ijazah Diploma/Universitas.

Secara keseluruhan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang termasuk pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 terhitung sebanyak 97.956 orang, yang terdiri dari 3.321 penduduk yang tidak/belum pernah sekolah/tidak belum tamat SD; 12.736 orang yang memiliki ijazah SD Sederajat; 18.838 orang yang memiliki ijazah SMP Sederajat; 48.722 orang yang memiliki ijazah SMA Sederajat dan 14.339 orang yang memiliki ijazah Diploma/Universitas.

6.4 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Di lain pihak, dewasa ini isu sentral yang menjadi pembahasan dalam berbagai kesempatan adalah produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor (lapangan usaha) akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pada Tahun 2019 penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 147.181 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang mencapai jumlah 189.030 orang. Penurunan ini kemungkinan karena penyempitan lahan pertanian sehingga mengakibatkan penurunan lapangan kerja.

Penduduk perempuan di Kabupaten Bandung yang bekerja di sektor pertanian tahun 2019 lebih sedikit dari penduduk laki-laki.

Ketenagakerjaan

Penduduk yang bekerja di sektor tersebut sebanyak 112.806 orang penduduk laki-laki sedangkan penduduk perempuan sebanyak 34.375 orang.

Tabel 6.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	112.806	34.375	147.181
Manufaktur	482.463	242.030	724.493
Jasa	479.498	337.034	816.532
Jumlah	1.074.767	613.439	1.688.206

Sumber: Sakernas 2019

Sementara itu penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor manufaktur di Kabupaten Bandung tahun 2019 mencapai 724.493 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai jumlah 480.052 orang. Hal ini dimungkinkan akibat

Ketenagakerjaan

bertambahnya sektor manufaktur yang otomatis menyedot tenaga kerja lebih banyak. Penduduk laki-laki yang bekerja di sektor manufaktur lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang bekerja di sektor manufaktur sebanyak 482.463 orang sedangkan penduduk perempuan sebanyak 242.030 orang.

Untuk sektor jasa, tercatat sebanyak 816.532 orang penduduk Kabupaten Bandung yang bekerja di sektor tersebut. Penduduk laki-laki yang bekerja di sektor ini terhitung sebanyak 479.498 orang sedangkan penduduk perempuan orang 337.034 orang.

Secara keseluruhan, pada tahun 2019 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kabupaten Bandung mencapai 1.688.206 orang. Penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dari penduduk perempuan, yaitu sebanyak 64% dari total seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu.

6.5 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN

Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh macam yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian,

Ketenagakerjaan

pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh/pekerja, usaha sendiri, dengan yang menjadi pekerja keluarga pada sektor tertentu.

Status pekerjaan dapat dijadikan sebagai indikator tidak langsung yang menggambarkan tingkat produktivitas kerja. Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif tradisional, sedangkan sektor dan jenis pekerja yang modern terdapat lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha yang dengan buruh tetap.

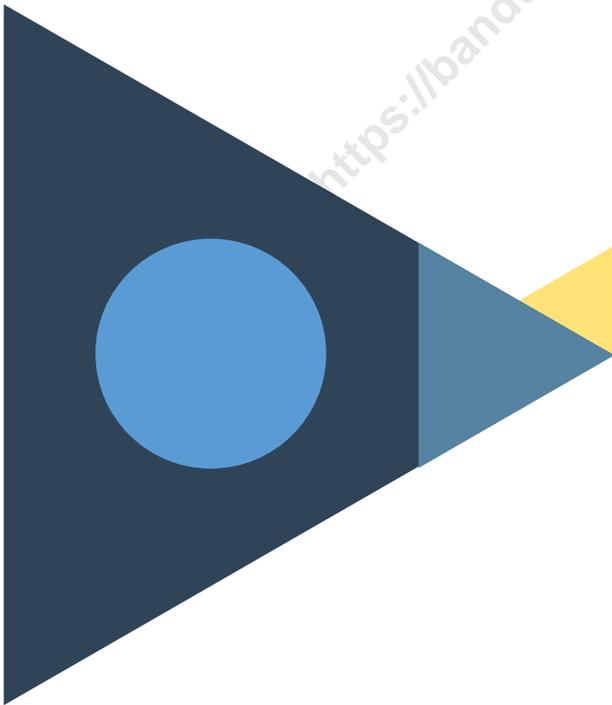
Pada tahun 2019, status pekerjaan utama terbanyak penduduk Kabupaten Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu lalu adalah sebagai buruh/karyawan, yaitu sebanyak 909.107 orang atau sekitar 54% dari total. Kemudian diikuti dengan status berusaha sendiri sebanyak 329.813 jiwa atau 20%, kemudian status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 156.164 orang atau sekitar 9%.

Tabel 6.5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Berusaha Sendiri	210.183	119.630	329.813
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	93.683	62.481	156.164
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	40.108	5.988	46.096
Buruh/Karyawan	600.437	308.670	909.107
Pekerja Bebas Pertanian	46.044	17.900	63.944
Pekerja Bebas di Non Pertanian	68.767	24.152	92.919
Pekerja Keluarga/Pekerja Tak Dibayar	15.545	74.618	90.163
Jumlah	1.074.767	613.439	1.688.206

Sumber: Sakernas, 2019

VII. Taraf dan Pola Konsumsi



Taraf dan Pola Konsumsi

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita adalah rata-rata yang diperlukan oleh setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan akan makanan dan non makanan. Untuk daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah atau menengah, persentase pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dari pada pengeluaran untuk non makanan sedangkan untuk daerah tingkat kesejahteraan tinggi terjadi sebaliknya, dimana persentase pengeluaran untuk non makanan lebih tinggi dari pada pengeluaran makanan. Perubahan tingkat kesejahteraan ke arah lebih baik biasanya ditandai dengan adanya pergeseran persentase tertinggi pengeluaran dari yang tadinya pengeluaran untuk makanan menjadi pengeluaran untuk non makanan.

7.1 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah,

Taraf dan Pola Konsumsi

sebaiknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan merupakan seluruh pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Arti lainnya adalah merupakan pengeluaran rata-rata seorang tiap bulannya, baik itu untuk kebutuhan makanan maupun non makanan.

Di Kabupaten Bandung, persentase rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 2019 untuk kelompok makanan mencapai 53,44%. Persentase tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya yang mencapai 47,64%.

Taraf dan Pola Konsumsi

Sementara itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan mencapai 46,56%. Persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 52,56%.

Tabel 7.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2019

Kelompok Barang	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(5)
Makanan	52,38	47,64	53,44
Bukan Makanan	47,62	52,36	46,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2017-2019

Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung lebih banyak memprioritaskan pengeluaran makanan untuk kelangsungan hidup dibandingkan keperluan selain makanan. Fenomena ini bisa mengindikasikan bahwa keperluan non makanan sudah terpenuhi atau sebaliknya tidak adanya alokasi dana untuk keperluan non makanan.

Tabel 7.2 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2019

Kelompok Barang	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	568.489	536.512	587.235
Bukan Makanan	516.727	589.650	511.513
Jumlah	1.085.216	1.126.162	1.098.748

Sumber: Susenas, 2017-2019

Tahun 2019 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Bandung mencapai 587.235 rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan mencapai 511.513 rupiah. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Taraf dan Pola Konsumsi

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Tahun 2019 di Kabupaten Bandung mencapai 1.098.748 rupiah. Rata-rata pengeluaran tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.2 KONSUMSI PROTEIN

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai kesehatan yang optimal. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 7.3 Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang Tahun 2019

Kelompok Barang	Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal)
(1)	(2)
1. Padi-padian	813,89
2. Umbi-umbian	26,69
3. Ikan/udang/cumi/ kerang	34,67
4. Daging	86,89
5. Telur dan susu	70,24
6. Sayur-sayuran	30,00
7. Kacang-kacangan	58,49
8. Buah-buahan	41,81
9. Minyak dan kelapa	270,99
10. Bahan minuman	82,42
11. Bumbu-bumbuan	9,34
12. Bahan makanan lainnya	79,63
13. Makanan dan minuman jadi	593,64
14. Rokok dan tembakau	0,00
Jumlah	2.198,69

Sumber: Susenas, 2019

Taraf dan Pola Konsumsi

Makanan yang dikonsumsi manusia sudah seharusnya memenuhi kecukupan energi dan protein. Di Kabupaten Bandung, rata-rata konsumsi energi pada tahun 2019 mencapai 2198,69 kkal. Bila dibandingkan dengan syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal per kapita per hari, maka jumlah tersebut telah berada di atas rata-rata kecukupan energi.

Begitu pula dengan angka kecukupan protein, hasil Susenas tahun 2019 mencatat bahwa rata-rata konsumsi protein penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar 62,17 gram. Hal ini berarti konsumsi protein per hari penduduk Kabupaten Bandung di Tahun 2019 telah memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 57 gram per kapita per hari.

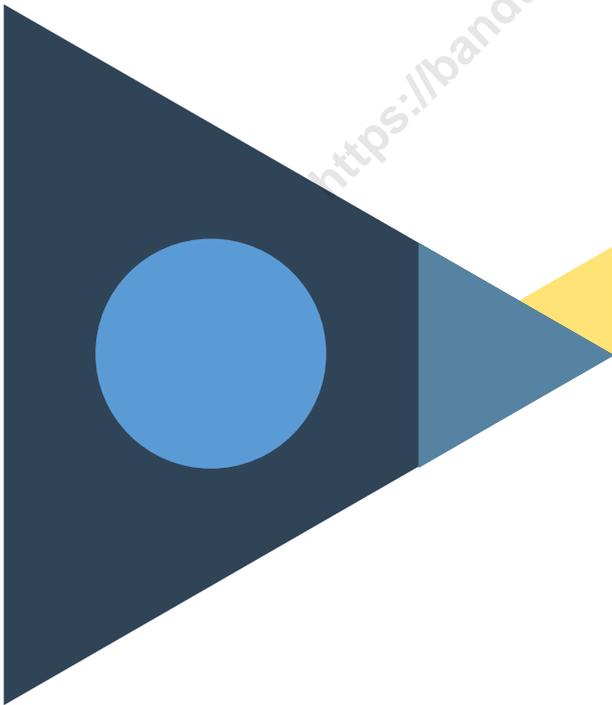
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kalori dan protein per hari penduduk Kabupaten Bandung di Tahun 2019 sudah memenuhi angka kecukupan energi dan protein standar penduduk Indonesia.

Tabel 7.4 Rata-Rata Konsumsi Protein (gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang Tahun 2019

Kelompok Barang	Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (gram)
(1)	(2)
1. Padi-padian	19,14
2. Umbi-umbian	0,44
3. Ikan/udang/cumi/ kerang	5,67
4. Daging	5,59
5. Telur dan susu	4,05
6. Sayur-sayuran	1,64
7. Kacang-kacangan	5,89
8. Buah-buahan	0,48
9. Minyak dan kelapa	0,03
10. Bahan minuman	0,73
11. Bumbu-bumbuan	0,44
12. Konsumsi lainnya	1,57
13. Makanan dan minuman jadi	16,52
14. Rokok dan tembakau	0,00
Jumlah	62,17

Sumber: Susenas, 2019

VIII. Perumahan



Perumahan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat.

Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan akan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini, rumah tidak hanya merupakan sarana pengaman bagi manusia, akan tetapi juga harus memenuhi kebutuhan manusia dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi. Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Dengan demikian kebutuhan dasar akan rumah tempat tinggal dengan lingkungan sekitar yang baik dan sehat haruslah terpenuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Permukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan

Perumahan

berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, rumah dan kelengkapannya menjadi salah satu indikator penentu kesejahteraan rakyat dan harus memenuhi standar minimal baik dari segi kesehatan maupun kualitas teknis. Salah satu indikator perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas. Indikator lain yang meliputi fasilitas rumah secara umum adalah luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas rumah yang baik dan tersedianya fasilitas yang memadai dan sesuai standar kesehatan akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah yang menyangkut bidang perumahan terus ditingkatkan bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, melainkan juga dari segi kualitas serta harga yang terjangkau. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat menjadikan kebutuhan terhadap perumahan akan semakin meningkat pula. Sementara luas daratan yang tetap tidak bisa bertambah, maka pembukaan lahan untuk kepentingan permukiman harus tetap mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak. Lahan

pertanian yang diubah menjadi lahan permukiman tentu akan berakibat pada berkurangnya produksi pangan yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut. Belum lagi lahan produktif yang diubah fungsinya menjadi industri dan infrastruktur akan menyita sumber daya air tanah.

Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2019

Status Kepemilikan	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Milik Sendiri	78,87
Bukan Milik Sendiri	21,13
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Di Kabupaten Bandung persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati pada tahun 2019 terdiri dari 78,87% tempat tinggal milik sendiri, dan bukan milik sendiri 21,13%. Bukan milik sendiri bisa berarti rumah sewa/kontrak, bebas sewa, atau dinas.

Perumahan

Dari data seperti ini bisa di katakan bahwa kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bandung cukup baik karena penduduk yang belum memiliki rumah sendiri hanya sebanyak 21,13%.

Kesehatan seseorang bisa dilihat dari luas lantai per kapita, semakin kecil luas lantai per kapita maka akan cukup berpengaruh terhadap kesehatan seseorang karena akan semakin kecil juga ruang gerak dan kualitas udara yang dimiliki. Sebaliknya semakin besar luas lantai per kapita maka akan cukup berpengaruh juga terhadap kesehatan seseorang karena akan semakin besar juga ruang gerak dan kualitas udara yang dimiliki.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10m^2 . Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak, serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan per orang adalah 9m^2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,8m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika

Perumahan

penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8m^2 (BPS 2001). Sementara menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 bahwa salah satu kriteria rumah layak huni adalah memenuhi kecukupan luas minimum $7,2\text{m}^2$ sampai 12m^2 per kapita.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita (m^2) Tahun 2019

Luas Lantai per Kapita	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
$\leq 7,2 \text{ m}^2$	15,35
$7,3 - 9,9 \text{ m}^2$	13,68
$\geq 10 \text{ m}^2$	70,97

Sumber: Susenas 2019

Persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita berdasarkan kriteria layak huni mencapai minimal angka 84,65%. Ini artinya penduduk kabupaten Bandung memiliki angka yang baik dalam hal rumah tinggal yang memenuhi syarat layak huni berdasarkan luas lantai.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria seperti dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Terluas Tahun 2019

Jenis Atap	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Beton	3,69
Genteng	93,59
Asbes	2,72
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Di Kabupaten Bandung, persentase rumah tangga dengan jenis atap rumah terluas beton mencapai 3,69%, genteng mencapai 93,59% dan asbes mencapai 2,72%. Sementara rumah dengan jenis atap lainnya 0,00%. Angka ini bukan berarti tidak ada rumah dengan jenis atap lainnya akan tetapi sangat sedikit sekali.

Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2019

Jenis Dinding	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Tembok	80,08
Plesteran Anyaman bambu	1,35
Kayu	4,27
Bambu/ Anyaman bambu	14,29
Lainnya	0,01
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Untuk jenis dinding, rumah tangga dengan jenis dinding rumah tinggal berupa tembok sudah mencapai 80,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk sudah cukup bagus. Adapun persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas plesteran anyaman bambu yaitu 1,35%, dinding kayu sebesar 4,27%, dinding bambu/anyaman bambu sebanyak 14,29% sedangkan besar dinding selain itu sebesar 0,01%.

**Persentase Rumah Tangga menurut
Tabel 8.5 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun
2019**

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Sendiri	81,16
Lainnya	18,84
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Rumah tinggal yang layak tentunya memiliki fasilitas tempat buang air besar. Dari tabel 8.5 dapat dilihat bahwa 81,16% rumah tangga sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Angka 81,16% menunjukkan angka yang baik bagi penduduk kabupaten Bandung yang rumah tinggalnya memiliki fasilitas buang air besar.

Disisi lain, tercatat masih ada juga penduduk yang menggunakan fasilitas buang air besar, baik WC bersama, MCK komunal/umum atau lainnya sebesar 18,84%.

Tabel 8.6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga Tahun 2019

Jenis Kloset	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Leher Angsa	97,04
Lainnya	2,96
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Adapun dalam fasilitas buang air besar ada yang menggunakan kloset leher angsa atau lainnya. Kloset leher angsa tentu tidak akan mengeluarkan bau tidak sedap yang mungkin ditimbulkan dari saluran akhir tinja karena udaranya tertutup dengan air. Sebanyak 97,04% rumah tangga menggunakan jenis kloset leher angsa.

Persentase rumah tangga Kabupaten Bandung tahun 2019 menurut jenis kloset, tentunya perlu diapresiasi sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kesehatan lingkungan.

Sedangkan untuk tempat pembuangan akhir tinja, sebagian besar rumah tangga menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL, yaitu

Perumahan

76,14%. Sedangkan sisanya sebesar 23,86% baik menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut atau lubang tanah untuk tempat pembuangan akhir tinja.

**Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat
8.7. Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2019**

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Tangki septik/IPAL/SPAL	76,14
Lainnya	23,86
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Selain kualitasnya, kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas tersebut adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang layak, serta adanya penerangan yang baik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Perumahan

Sedemikian pentingnya ketersediaan fasilitas ini hingga menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals*-MDGs). Target tersebut adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak.

Persentase terbesar sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak di Kabupaten Bandung adalah dari air kemasan/isi ulang dari pada yang lain persentase mencapai 58,96%, kemudian sumur bor/pompa sebesar 13,17%, setelah itu sumur/mata air terlindung dengan persentase mencapai 11,96%, sedangkan sisanya adalah sumur/mata air tak terlindung sebesar 10,91 dan ledeng dengan persentase sekitar 5%.

**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air
Tabel 8.8 Utama yang digunakan Rumah Tangga untuk
Memasak Tahun 2019**

Sumber Air Utama	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Air Kemasan/ Isi Ulang	58,29
Ledeng	5,66
Sumur Bor/Pompa	13,17
Sumur/Mata Air Terlindung	11,96
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	10,91
Lainnya	0,01
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Perumahan

Air isi ulang merupakan sumber air utama yang saat ini banyak dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Bandung. Tidak hanya digunakan untuk memasak, bahkan untuk minum pun air isi ulang banyak dikonsumsi. Air isi ulang bisa dikonsumsi langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Fenomena ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sehingga bermunculan usaha air isi ulang, bahkan menawarkan jasa pengiriman ke rumah-rumah untuk memudahkan konsumen.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam MDGs, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah rumah tangga yang air minumnya bersumber dari air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja diatas 10m. Sedangkan untuk sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja diatas 10m. Persentase untuk sumber air minum bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2019 mencapai 82,41% dan untuk sumber air minum layak mencapai 97,84%.

Tabel 8.9 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih dan Layak Tahun 2019

Sumber	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Sumber Air Minum Bersih *)	82,41
Sumber Air Minum Layak **)	97,84

Sumber: Susenas, 2019

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja \geq 10 m]

**) Terdiri dari leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja \geq 10 m]

Perumahan

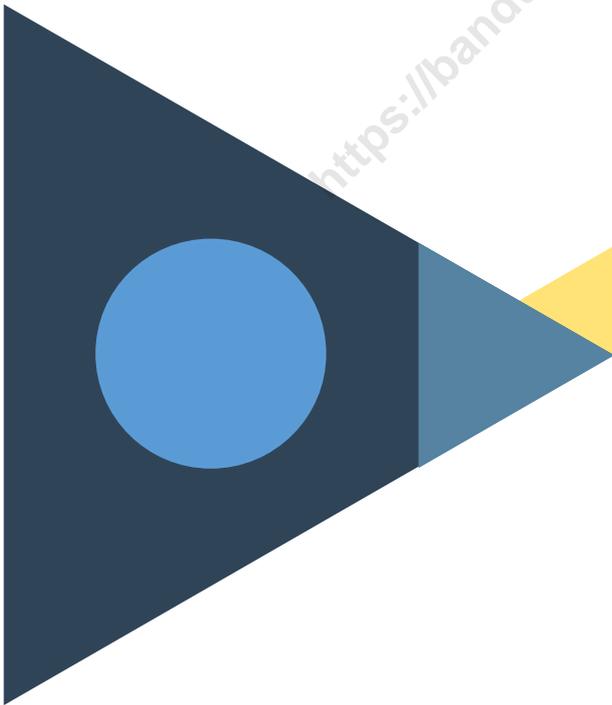
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik PLN. Penerapan listrik PLN untuk Kabupaten Bandung sudah sangat bagus karena listrik PLN sudah mencapai ke seluruh pelosok pedesaan di Kabupaten Bandung. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama yang sudah optimal, mencapai angka 99,62% untuk listrik PLN.

Tabel 8.10. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2019

Sumber Penerangan Utama	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Listrik PLN	99,62
Listrik non PLN	0,38
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas, 2019

IX. Sosial Lainnya



Sosial Lainnya

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi meringankan beban rumah tangga miskin. Program tersebut diantaranya pemberian beras murah Raskin/Rastra, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka

akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Tabel 9.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2019

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Raskin/Rastra atau Penerima BPNT	8,66
Program Indonesia Pintar (PIP)	9,90
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	10,00
Program Keluarga Harapan (PKH)	9,27

Sumber: Susenas, 2019

Pada tahun 2019, persentase rumah tangga yang membeli/menerima beras murah raskin/beras sejahtera (rastra) atau penerima bantuan pangan non tunai di Kabupaten Bandung hanya mencapai 8,66%. Hal ini mengindikasikan hanya sebagian kecil rumah tangga yang ada adalah pernah membeli atau menerima beras sejahtera pada tahun 2019 atau menerima bantuan pangan non tunai.

Sosial Lainnya

Usaha rakyat sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau negara. Mengapa? Sebab keberadaan usaha rakyat ini sangatlah krusial karena bisa menopang ekonomi nasional dan juga mampu membuka lapangan kerja. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha rakyat adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan yang antara lain berupa pemberian penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pemerintah lainnya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM). BSM adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Program BSM, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag)

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang

Sosial Lainnya

mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Tujuan dari KPS dan KKS sendiri tiada lain adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pemberian ini langsung dari pemerintah untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun tidak secara signifikan.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk

Sosial Lainnya

kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Jaminan sosial dapat berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Kabupaten Bandung hanya sedikit saja yang menerima jaminan sosial selama tahun 2019, yaitu sebesar 8,64% untuk jaminan pensiun/hari tua sebesar dan asuransi/pesangon PHK sebesar 9,54%.

Tabel 9.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial selama Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial Tahun 2019

Memiliki Jaminan Sosial	Persentase
(1)	(2)
Jaminan Pensiun/ Hari Tua	8,64
Asuransi/Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	9,54

Sumber: Susenas 2019

Kepemilikan aset pada suatu rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kepemilikan aset ini bisa dilihat dari aset fasilitas rumah tangga atau aset transportasi. Aset fasilitas rumah tangga bisa berupa tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es/kulkas, AC, pemanas air, emas/perhiasan (minimal 10 gram), dll. Sedangkan aset transportasi bisa berupa sepeda motor, mobil, dll.

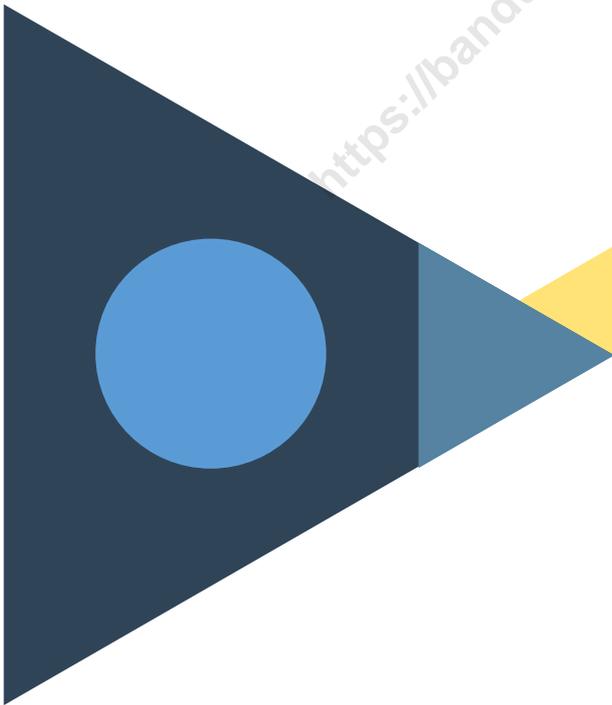
Tabel 9.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset Tahun 2019

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset
(1)	(2)
Fasilitas rumah tangga	60,55
Transportasi	74,94

Sumber: Susenas, 2019

Aset transportasi di Kabupaten Bandung lebih tinggi dari aset fasilitas rumah tangga. Hal ini terkait dengan keperluan transportasi untuk aktifitas keseharian yang harus dipenuhi rumah tangga, baik bekerja, sekolah, atau kegiatan lainnya.

X. Teknologi Informasi



Aspek teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang dapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon seluler pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan masyarakat dalam rangka mengikuti tren gaya hidup modern.

Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Penggunaan HP pada saat ini memang sangat luar biasa, bukan hanya orang dewasa tetapi mulai dari anak-anak sudah terbiasa dalam penggunaan HP ini baik laki-laki ataupun perempuan. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler berupa HP adalah sebesar 73,47 persen dari total penduduk.

Tabel 10.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Kemilikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP)	77,50	69,20	73,47

Sumber: Susenas 2019

Tabel 10.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Mengakses Internet	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mengakses Internet	59,32	52,63	56,07

Sumber: Susenas, 2019

Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* (WWW) dan membawa email, berita, hiburan dan file data.

Mengakses internet untuk saat ini tidak harus lewat PC saja, tetapi bisa lebih praktis hanya lewat *smartphone* yang mudah dibawa kemana-mana. Seiring mudahnya mengakses internet tahun 2019, tercatat sebanyak 56,07 persen penduduk Kabupaten Bandung berumur 5 tahun ke atas mengakses internet.

Dirinci lebih dalam, terdapat sekitar 59,32% penduduk laki-laki dari total penduduk laki-laki yang mengakses internet, sementara penduduk perempuan yang mengakses internet tercatat sebesar 52,63% dari total penduduk perempuan. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bandungkab.bps.go.id>



BPS Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM. 17 (Komplek Pemda Kabupaten Bandung)

Bandung 40911 Telp. (022) 5895905, Fax. (022) 5880882, Email. bps3204@bps.go.id